

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengangguran memang kini belum bisa terlepas dari salah satu bagian masalah yang di hadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Pengangguran di negeri ini, masih menjadi masalah aktual yang menjadi bahasan panjang sejak orde baru tumbang dan Indonesia di cap sebagai negara yang cukup terganggu perkembangan perekonomiannya. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang harus melakukan banyak perubahan untuk mendukung pembangunan nasional. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya stabilitas nasional, iklim investasi yang baik, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia.

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat keberhasilannya dari beberapa indikator perekonomian, satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu Negara apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Pengangguran sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2008).

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (BPS, 2016).

Masalah ini cukup rumit sehingga berbagai usaha ataupun kebijakan perlu dilakukan pemerintah untuk dapat mengatasinya, dengan tujuan dapat berupa :

1. Tujuan bersifat ekonomi, yang dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan.
2. Tujuan bersifat sosial politik yaitu pertimbangannya untuk meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masalah kejahatan dan untuk mewujudkan kestabilan keluarga, menghindari masalah kejahatan dan untuk mewujudkan kestabilan politik (Sukirno, 2008)

Selama ini, berbagai kebijakan dibuat disetiap pemerintah untuk menanggulangi masalah pengangguran, kebijakan yang didesain secara sentralistik oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dimenti oleh kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi, merancang berbagai program untuk dapat mengatasi masalah pengangguran. Program tersebut diantaranya,

memberikan pendidikan gratis untuk meningkatkan taraf pendidikan, pelatihan tenaga kerja disetiap daerah, jobfair, serta bimbingan dan bantuan untuk berwirausaha. Jumlah pengangguran Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 7,65 juta orang (6,18%) atau bertambah 320 ribu dari tahun sebelumnya, angka pengangguran yang masih cukup besar ini mengindikasikan bahwa berbagai program yang telah dijalankan oleh pemerintah belum dapat menekan masalah tingkat pengangguran.

Di provinsi Gorontalo, masalah tingkat pengangguran juga merupakan isu penting yang menjadi permasalahan tahunan dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat juga harus mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah pengangguran yang ada di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data badan pusat statistik, tingkat pengangguran Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi. Perkembangan tingkat pengangguran Provinsi Gorontalo selama lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 1. Sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo**  
**Tahun 2011-2015 (%)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kab. Boaelomo	3,80	4,73	1,66	2,08	4,57
Kab. Gorontalo	3,91	3,27	4,96	3,89	3,62
Kab. Pohuwato	4,05	5,27	1,34	2,38	2,06
Kab. Bonebolango	3,93	6,94	3,88	4,84	6,76
Kab. Gorut	3,92	2,99	2,75	3,83	5,61
Kab. Gorontalo	5,88	4,53	7,37	7,22	6,14
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>4,26</b>	<b>4,36</b>	<b>2,33</b>	<b>4,18</b>	<b>4,65</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat secara total tingkat pengangguran Provinsi Gorontalo setiap tahunnya. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada tahun 2013 diantara 6 Kabupaten/Kota yang ada tingkat pengangguran tertinggi dimiliki Kota Gorontalo sebesar 7,37% sedangkan yang terendah dimiliki Kabupaten Boalemo yaitu 1,66%. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran antar Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo tidak merata, hal tersebut disebabkan oleh tidak berimbangnya

perkembangan antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu daerah dengan jumlah angkatan kerja di dalam suatu daerah tersebut.

Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi pengangguran dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Menurut (Sukirno,2008) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang artinya jumlah pengangguran akan menurun. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi turun maka pengangguran akan meningkat.

**Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan *Produk Domestic Regional Bruto* (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015 (%)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kab. Boaelomo	6,74	7,42	7,48	7,30	6,37
Kab. Gorontalo	7,72	7,74	7,73	7,77	6,29
Kab. Pohuwato	7,11	7,51	7,67	7,27	6,06
Kab. Bonebolango	6,92	7,47	7,63	7,72	6,52
Kab. Gorut	7,00	7,13	7,16	7,15	7,30
Kab. Gorontalo	7,79	7,88	7,90	7,93	7,23
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>7,71</b>	<b>7,91</b>	<b>7,67</b>	<b>7,27</b>	<b>6,23</b>

Sumber : BPS/Data diolah 2017

Dapat dilihat dari tabel 1.2 memperlihatkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2011-2015 menunjukkan kondisi yang stabil yakni rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai Kabupaten Gorontalo Utara dengan pertumbuhan sebesar 7,30 %. Sedangkan laju pertumbuhan terendah adalah Kabupaten/Gorontalo 6,29 %. Kestabilan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki potensi yang kuat dalam perekonomian.

Pada umumnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatannya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja semakin bertambah, tingkat pendapatan dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi (Sukirno, 2006)

Menurut Arsyad (2005) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran suatu daerah, karena tingginya jumlah penduduk juga akan berpengaruh pada jumlah angkatan kerja yang akan berpartisipasi dalam pembangunan atau dapat dikatakan jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja akan semakin bertambah. Bertambahnya angkatan yang tidak diikuti dengan tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran.

**Tabel 1.3 Pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015**

**(Dalam Jiwa)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kab. Boaelomo	133,633	137,476	141,547	145,58	149,832
Kab. Gorontalo	360,4	363,146	365,781	368,149	370,441
Kab. Pohuwato	132,897	136,324	139,675	143,338	146,896
Kab. Bonebolango	144,695	146,773	148,971	151,094	153,166
Kab. Gorut	105,759	107,092	108,324	109,502	110,7
Kab. Gorontalo	185,177	189,476	193,692	197,97	202,202
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>96,342</b>	<b>98,401</b>	<b>101,022</b>	<b>103,205</b>	<b>104,991</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel 1.3 memperlihatkan angka yang bervariasi antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, pada tahun 2015, diantara 6 Kabupaten/Kota yang ada, jumlah penduduk tertinggi dimiliki Kota Gorontalo yaitu 202,202 sedangkan yang terendah dimiliki Kabupaten Gorut yaitu 110,7 Pertumbuhan Penduduk yang semakin pesat, ini akan menimbulkan berbagai masalah baru salah satunya masalah pengangguran.



Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang akan berpartisipasi dalam pembangunan atau dapat dikatakan jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja akan semakin bertambah. Bertambahnya angkatan kerja yang tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan dan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian yang dijawab melalui penelitian, yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh laju pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) terhadap pengangguran di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo tahun 2011-2015.
2. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pengangguran di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo tahun 2011-2015.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada masalah penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) terhadap pengangguran Di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo tahun 2011-2015.

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pengangguran Di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo tahun 2011-2015.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu ekonomi pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai pengangguran dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti kepada pemerintah untuk selanjtnya dapat dipertimbangkan kebijakan, sehingga kebijakan tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran daerahnya.
- b. Dapat memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca berdasarkan penelitian yang menyelaraskan pengetahuan.